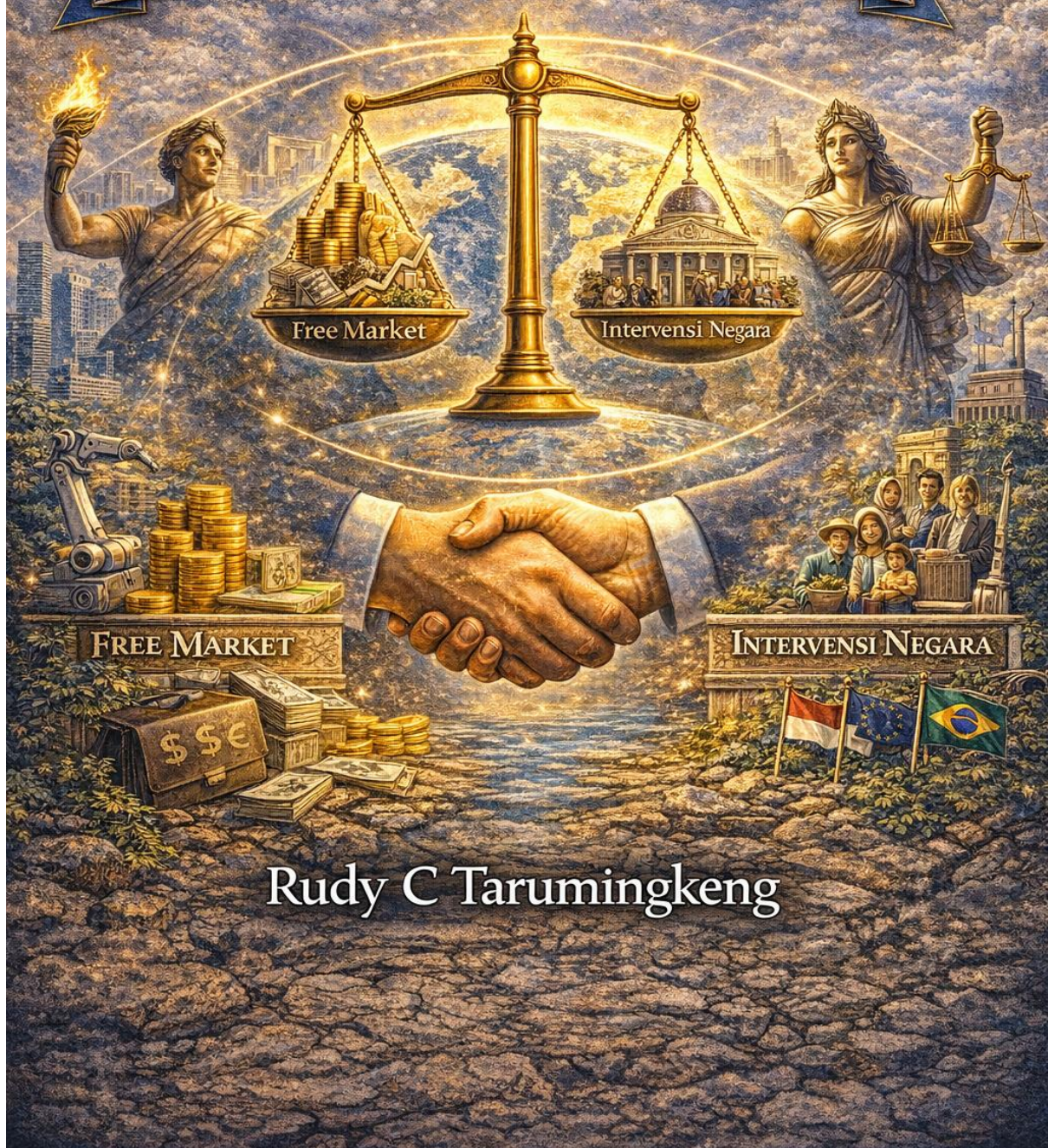


Keadilan Sosial dalam Arsitektur Ekonomi Dunia

Antara Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Keadilan Sosial dalam Arsitektur Ekonomi
Dunia: Antara Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

14 April 2026

KEADILAN SOSIAL DALAM ARSITEKTUR EKONOMI DUNIA: ANTARA KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA

Abstrak

Makalah ini membahas ketegangan klasik namun terus relevan antara kebebasan pasar dan intervensi negara dalam membentuk arsitektur ekonomi dunia yang adil. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa pasar memiliki fungsi penting sebagai mekanisme koordinasi, inovasi, dan penciptaan nilai, tetapi pasar tidak dapat dijadikan satu-satunya prinsip pengorganisasi kehidupan ekonomi. Tanpa institusi publik yang kuat, perlindungan sosial yang memadai, serta koreksi terhadap distribusi peluang dan hasil, kebebasan pasar cenderung menghasilkan ketimpangan yang persisten, memperbesar kerentanan, dan melemahkan legitimasi sosial dari sistem ekonomi itu sendiri. Dalam filsafat politik, keadilan distributif dipahami sebagai prinsip-prinsip normatif yang memberi arahan tentang bagaimana manfaat dan beban ekonomi semestinya dibagi dalam masyarakat. Pasar, dalam pengertian filosofis, juga bukan fakta alamiah yang berdiri sendiri, melainkan institusi sosial yang dibentuk oleh hukum, kebijakan, dan relasi kekuasaan. Karena itu, perdebatan antara pasar dan negara sebetulnya bukan pertentangan antara kebebasan dan paksaan semata, melainkan pertanyaan tentang desain institusi yang paling mampu menggabungkan efisiensi, kebebasan, dan keadilan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Urgensi persoalan ini tampak jelas dalam kondisi dunia mutakhir. World Bank melaporkan bahwa pengurangan kemiskinan global dan peningkatan

shared prosperity tertahan sejak pandemi, sedangkan *Global Prosperity Gap* menunjukkan jarak besar antara pendapatan aktual masyarakat dan standar kemakmuran minimum yang lebih layak. UNDP menegaskan bahwa kenaikan pembangunan manusia global yang diproyeksikan untuk 2024 merupakan yang paling lemah sejak 1990 di luar tahun-tahun krisis. ILO menunjukkan bahwa *jobs gap* global masih sekitar 402,4 juta orang pada 2024, sementara World Bank memperkirakan sekitar 2 miliar orang di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tidak tercakup atau tercakup tidak memadai oleh perlindungan sosial. Dalam konteks seperti itu, keadilan sosial tidak dapat diposisikan sebagai agenda tambahan setelah pertumbuhan, tetapi harus dipandang sebagai inti dari arsitektur ekonomi dunia. Makalah ini berargumen bahwa sintesis baru dibutuhkan: pasar yang tetap produktif dan terbuka, tetapi dibatasi dan diarahkan oleh negara yang bertanggung jawab, institusi internasional yang lebih adil, serta kebijakan sosial yang memperluas kapabilitas manusia. ([World Bank](#))

Kata kunci: keadilan sosial, kebebasan pasar, intervensi negara, ekonomi global, ketimpangan, perlindungan sosial, pembangunan manusia, keadilan distributif

Keadilan Sosial dalam Arsitektur Ekonomi Dunia: Antara Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara

1. Pendahuluan

Di sepanjang sejarah modern, perdebatan tentang pasar dan negara selalu kembali dalam bentuk baru. Pada satu sisi, pasar dipuji karena kemampuannya mendorong produktivitas, spesialisasi, inovasi, dan efisiensi. Pada sisi lain, pasar sering dituduh memperlebar jurang sosial, menempatkan terlalu banyak risiko pada rumah tangga, dan mengubah kebutuhan manusia menjadi sekadar permintaan yang bergantung pada daya beli. Perdebatan ini menjadi lebih tajam dalam ekonomi global

kontemporer karena proses produksi, perdagangan, keuangan, dan teknologi kini bekerja pada skala lintas batas, sementara perlindungan sosial, demokrasi fiskal, dan kapasitas redistribusi masih sangat bergantung pada negara-bangsa. Ketika dunia makin terhubung, ketidakadilan juga bergerak lintas batas dengan kecepatan yang sama. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Di sinilah makna “arsitektur ekonomi dunia” menjadi penting. Yang dipersoalkan bukan hanya kebijakan ekonomi suatu negara, melainkan susunan institusi yang lebih luas: aturan perdagangan internasional, kebijakan fiskal, sistem perlindungan sosial, rezim keuangan, tata kelola digital, serta pembagian tanggung jawab antara pasar dan negara. Jika arsitektur ini berat sebelah, maka pertumbuhan dapat berjalan berdampingan dengan eksklusi. World Trade Organization menegaskan bahwa perdagangan yang lebih terbuka memang telah berkontribusi pada konvergensi pendapatan antarnegara dan memperbaiki kondisi hidup banyak orang, tetapi WTO juga menekankan bahwa manfaat itu tidak dibagikan secara setara kepada semua individu, wilayah, dan ekonomi. Keterbukaan, dengan kata lain, menghasilkan peluang, tetapi tidak otomatis menghasilkan keadilan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Masalahnya menjadi semakin mendesak ketika indikator mutakhir menunjukkan perlambatan kemajuan sosial global. IMF menggambarkan ekonomi dunia berada pada “critical juncture amid policy shifts,” dengan pertumbuhan global yang diperkirakan menurun dan risiko yang meningkat akibat ketegangan dagang, ketidakpastian kebijakan, dan kerentanan struktural. World Bank memperingatkan bahwa pengurangan kemiskinan global telah melambat hampir sampai titik diam. UNDP menunjukkan bahwa pembangunan manusia pun mengalami perlambatan bersejarah. Bila pertumbuhan ekonomi melemah dan distribusinya tetap timpang, maka ketegangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara akan menjadi semakin politis sekaligus semakin moral. ([IMF](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa keadilan sosial dalam arsitektur ekonomi dunia menuntut penolakan terhadap dua ekstrem sekaligus. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa pasar yang dibiarkan relatif bebas akan, dengan sendirinya, menghasilkan kesejahteraan yang meluas. Ekstrem kedua adalah keyakinan bahwa negara dapat menggantikan fungsi pasar secara menyeluruh tanpa biaya besar terhadap efisiensi, inovasi, dan kebebasan. Yang dibutuhkan bukan kemenangan mutlak salah satu pihak, melainkan sintesis yang lebih cermat: pasar untuk menciptakan nilai, negara untuk meratakan kesempatan, mengoreksi ketimpangan, dan melindungi martabat manusia, serta institusi global untuk memastikan bahwa hubungan antarnegara tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan ekonomi. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

2. Keadilan Sosial dan Arsitektur Ekonomi Dunia: Kerangka Konseptual

Keadilan sosial, dalam pengertian filsafat politik, tidak identik dengan belas kasih atau amal. *Stanford Encyclopedia of Philosophy* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan distributif memberi panduan moral bagi proses dan struktur politik yang memengaruhi pembagian manfaat dan beban di dalam masyarakat. Artinya, keadilan distributif bukan sekadar menilai hasil akhir, tetapi juga memeriksa institusi yang membentuk hasil itu: hukum, pasar, kebijakan publik, dan struktur kesempatan. Dalam cakupan yang lebih luas, keadilan global memperluas pertanyaan ini ke tingkat lintas negara dengan menanyakan apa yang kita berutang satu sama lain dalam dunia yang saling bergantung. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Pasar, sebagaimana didefinisikan oleh SEP, adalah institusi tempat individu atau agen kolektif menukar barang dan jasa, biasanya dengan uang sebagai medium pertukaran, yang lalu menghasilkan harga. Definisi ini penting karena mengingatkan bahwa pasar bukan hukum alam. Ia adalah institusi sosial yang memiliki berbagai bentuk: pasar tenaga kerja, pasar perumahan, pasar finansial, pasar digital, dan seterusnya. Tiap pasar diatur oleh seperangkat hukum, norma, dan kebijakan yang menentukan siapa boleh masuk, bagaimana kontrak ditegakkan, dan siapa yang menanggung

risiko ketika terjadi kegagalan. Maka, membela “kebebasan pasar” sesungguhnya selalu berarti membela bentuk pasar tertentu yang sudah dibingkai oleh keputusan politik. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dari sudut pandang ini, arsitektur ekonomi dunia dapat dipahami sebagai susunan bertingkat dari institusi domestik dan internasional yang mengatur produksi, distribusi, perdagangan, investasi, kerja, dan perlindungan sosial. Pada tingkat nasional, arsitektur itu mencakup hukum pajak, kebijakan industri, pendidikan publik, sistem kesehatan, jaminan sosial, dan rezim tenaga kerja. Pada tingkat internasional, ia mencakup aturan WTO, sistem moneter dan keuangan internasional, rezim utang, pembiayaan pembangunan, hingga tata kelola iklim dan teknologi. Bila kedua tingkat ini saling menguatkan, maka kemakmuran dapat diperluas. Tetapi bila keduanya saling bertentangan—misalnya pasar global sangat mobile sementara perlindungan sosial tetap lokal dan terbatas—maka ketidakadilan mudah melembaga. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Secara normatif, pertanyaan pokoknya adalah: apa yang membuat arsitektur ekonomi dunia dapat disebut adil? Salah satu jawaban yang masuk akal adalah bahwa arsitektur itu harus, setidaknya, memenuhi tiga syarat. Pertama, ia harus memberi ruang bagi kebebasan ekonomi dan inisiatif produktif. Kedua, ia harus memastikan bahwa kebebasan itu tidak hanya formal, tetapi ditopang oleh kesempatan yang cukup adil bagi warga untuk berpartisipasi. Ketiga, ia harus mengoreksi hasil pasar bila hasil itu menghasilkan eksklusivitas, kerentanan, atau konsentrasi kekuasaan yang merusak kehidupan demokratis. Dalam kerangka ini, negara bukan musuh pasar, melainkan unsur konstitutif dari pasar yang adil. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

3. Kebebasan Pasar: Janji, Rasionalitas, dan Kontribusinya

Tidak mungkin membahas keadilan sosial tanpa terlebih dahulu mengakui apa yang benar dari kebebasan pasar. Adam Smith, sebagaimana dibaca oleh *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, bukan sekadar ekonom teknis, melainkan pemikir moral dan politik yang melihat masyarakat komersial

sebagai sumber potensial bagi kemakmuran. Smith memahami bahwa pembagian kerja dan perluasan pasar dapat meningkatkan produktivitas secara besar-besaran. Bahkan etika bisnis kontemporer, sebagaimana dicatat SEP, masih merujuk pada ilustrasi Smith tentang spesialisasi dalam pembuatan pin untuk menunjukkan bagaimana pembagian kerja meningkatkan hasil produksi. Artinya, pasar memang memiliki logika produktif yang kuat dan tidak dapat diabaikan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam ekonomi global, sumbangan pasar terlihat pada perdagangan, investasi, dan difusi teknologi. WTO menegaskan bahwa keterbukaan perdagangan telah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung banyak pekerjaan, dan memberi akses pada barang dan jasa yang lebih terjangkau. Laporan WTO 2024 juga menunjukkan bahwa selama beberapa dekade terakhir dunia mengalami konvergensi pendapatan yang signifikan antarnegeri. Negara yang mampu terhubung dengan pasar global, membangun kapasitas produksi, dan menyerap teknologi baru sering kali memperoleh kemajuan lebih cepat daripada negara yang tertutup secara kronis. Karena itu, kritik terhadap pasar yang sama sekali menafikan nilai kebebasan ekonomi akan kehilangan daya jelaskan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Di bidang keuangan dan digital, dinamika pasar juga berkontribusi memperluas akses. *Global Findex 2025* mencatat bahwa 79 persen orang dewasa di dunia kini memiliki akun keuangan, naik dari 74 persen pada 2021. Laporan itu juga menghadirkan untuk pertama kalinya data global yang dapat dibandingkan tentang kepemilikan telepon seluler, penggunaan internet, dan keamanan digital. Ini penting karena menunjukkan bahwa inovasi finansial dan digital, bila dipadukan dengan infrastruktur yang memadai, dapat membuka jalan bagi partisipasi ekonomi yang lebih luas, terutama bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau sistem formal. ([World Bank](#))

Bagi banyak negara berkembang, kebebasan pasar juga berarti kesempatan untuk keluar dari stagnasi melalui ekspor, industrialisasi, dan integrasi ke rantai nilai global. *World Development Report 2024* menegaskan bahwa negara berkembang membutuhkan strategi bertahap—*investment, infusion, innovation*—untuk menghindari jebakan pendapatan menengah. Laporan ini tidak menyerukan proteksionisme total, tetapi juga tidak mengandalkan liberalisasi pasif. Pesannya adalah bahwa pasar global menyediakan peluang, tetapi peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika negara aktif membangun kemampuan domestik. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pasar yang produktif selalu membutuhkan kapasitas institusional. ([World Bank](#))

Karena itu, pembelaan terhadap pasar tetap sah sejauh pasar dipahami sebagai mekanisme untuk melepaskan energi produktif masyarakat. Masalah timbul bukan ketika pasar diakui, melainkan ketika pasar diperlakukan sebagai hakim tertinggi dari semua nilai sosial. Begitu pasar diberi otoritas normatif yang berlebihan, ia mulai menentukan bukan hanya harga barang, tetapi juga harga diri manusia, nilai pekerjaan, dan bahkan kualitas hidup. Di titik inilah intervensi negara dan prinsip keadilan sosial memasuki panggung bukan sebagai pengacau, melainkan sebagai koreksi yang diperlukan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

4. Mengapa Pasar Saja Tidak Cukup

Masalah paling mendasar dari kebebasan pasar yang tidak dikoreksi adalah bahwa pasar tidak mendistribusikan titik awal secara adil. Anak-anak tidak lahir dengan pendidikan, gizi, kesehatan, keamanan, dan konektivitas yang setara. WHO menegaskan bahwa kondisi tempat orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta akses mereka pada uang, kekuasaan, dan sumber daya, sangat memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. WHO bahkan menyatakan bahwa ketidakadilan sosial terus “membunuh dalam skala besar,” karena akar nonmedis dari kesehatan yang buruk belum ditangani secara memadai. Dalam konteks ini, pasar cenderung

memperkuat ketimpangan awal bila negara tidak meratakan syarat-syarat dasar partisipasi. ([World Health Organization](#))

Pasar juga tidak memadai sebagai pelindung terhadap risiko. *State of Social Protection Report 2025* dari World Bank menyatakan bahwa sekitar 2 miliar orang di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tidak tercakup atau tercakup tidak memadai oleh perlindungan sosial dan sistem tenaga kerja. Tiga dari empat orang di negara berpendapatan rendah bahkan masih belum memiliki cakupan semacam itu. Padahal laporan ini menegaskan bahwa perlindungan sosial membantu rumah tangga mengelola krisis, keluar dari kemiskinan, menavigasi transisi, dan menangkap peluang kerja. Jika volatilitas pasar dibiarkan tanpa jaring pengaman, maka kebebasan pasar berubah menjadi kebebasan bagi yang kuat dan ketidakamanan bagi yang lemah. ([World Bank](#))

Batas berikutnya tampak jelas di pasar kerja. ILO menunjukkan bahwa walaupun tingkat pengangguran global bertahan di sekitar 5 persen pada 2024, *jobs gap* tetap sekitar 402,4 juta orang. Ini mencakup penganggur, pekerja putus asa, dan mereka yang sementara tidak mampu tersedia bekerja. Dengan kata lain, jutaan orang hidup di tepian pasar kerja: mereka tidak sepenuhnya “keluar” dari sistem, tetapi juga tidak memperoleh tempat yang aman dan bermartabat di dalamnya. Ketika pasar tenaga kerja hanya mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi, kerja mudah direduksi menjadi biaya, padahal bagi manusia kerja menyangkut harga diri, struktur hidup sehari-hari, dan partisipasi sosial. ([International Labour Organization](#))

Masalah yang sama muncul dalam kesejahteraan yang lebih luas. OECD menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak bisa dibaca hanya dari PDB atau rata-rata pendapatan, melainkan dari lebih dari 80 indikator yang mencakup hasil hidup saat ini, ketimpangan, serta sumber daya bagi kesejahteraan masa depan. Ringkasan OECD 2024 bahkan menekankan bahwa banyak aspek non-ekonomi dari kesejahteraan—kesehatan, hubungan sosial, dan kesejahteraan subjektif—memburuk sejak 2019 atau memperlihatkan risiko penurunan lebih lanjut. Ini berarti pasar dapat

menghasilkan pertumbuhan, tetapi masyarakat tetap bisa kehilangan keseimbangan hidup, rasa aman, dan kualitas relasi sosial. ([OECD](#))

Akhirnya, pasar juga cenderung gagal menangkap nilai dari mereka yang kebutuhannya mendesak tetapi daya belinya lemah. World Bank menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan global melambat hampir sampai titik diam, dan bahwa perbaikan *shared prosperity* tertahan. Bahkan, *Global Prosperity Gap* dipakai justru karena pertumbuhan rata-rata saja tidak cukup untuk menunjukkan seberapa jauh masyarakat dari standar hidup yang layak. Bila ukuran pembangunan harus diperbarui karena pasar dan pertumbuhan tidak otomatis menggambarkan kehidupan yang lebih baik bagi kelompok terbawah, maka jelas kebebasan pasar tidak cukup sebagai prinsip tunggal arsitektur ekonomi dunia. ([World Bank](#))

5. Intervensi Negara: Dari Penjaga Malam ke Arsitek Keadilan

Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa intervensi negara selalu identik dengan pembatasan kebebasan ekonomi. Dalam praktiknya, negara justru merupakan syarat keberadaan pasar modern: negara menegakkan kontrak, menjamin kepemilikan, menciptakan infrastruktur, menjaga mata uang, dan menyediakan kerangka hukum bagi persaingan. Bahkan Adam Smith, sebagaimana ditafsirkan SEP, memberi prioritas tinggi pada pemeliharaan keadilan dan mengakui peran pemerintah dalam mendirikan *public works* dan *public institutions*. Smith tidak membayangkan pasar sebagai dunia yang sepenuhnya lepas dari peran pemerintah. Ia justru memahami bahwa masyarakat komersial membutuhkan institusi publik agar tidak merusak dirinya sendiri. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam ekonomi global kontemporer, peran negara telah berkembang jauh melampaui fungsi "penjaga malam." Catatan kebijakan World Bank untuk G20 tahun 2024 menegaskan bahwa pertumbuhan inklusif membutuhkan intervensi di tiga tahap sekaligus: pra-pasar, di pasar, dan pasca-pasar. Pada tahap pra-pasar, negara perlu berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan dukungan keluarga. Pada tahap di pasar, negara harus memperluas akses terhadap pekerjaan, aset, kredit, dan menegakkan hak

tenaga kerja serta perlindungan dari diskriminasi. Pada tahap pasca-pasar, sistem pajak, transfer, dan subsidi digunakan untuk mengoreksi hasil yang terlalu timpang. Kerangka ini menunjukkan bahwa negara modern bukan sekadar penonton yang campur tangan sesekali, melainkan arsitek utama dari keadilan kesempatan dan keamanan ekonomi. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Peran ini semakin penting di tengah transformasi teknologi dan iklim. *World Development Report 2024* menegaskan bahwa banyak negara berkembang menghadapi "middle-income trap," dan bahwa keluar dari jebakan itu memerlukan strategi 3i yang disusun secara bertahap. Negara tidak cukup hanya menjaga stabilitas; ia perlu membangun kapasitas manusia, mendorong difusi teknologi, dan menciptakan kondisi bagi inovasi. Artinya, intervensi negara bukan sekadar redistribusi sesudah pasar bekerja, tetapi juga pembentukan kapabilitas sebelum pasar bekerja. Ini sangat penting untuk menilai debat klasik tentang negara versus pasar: dalam praktiknya, negara yang efektif justru memperluas manfaat pasar dengan membuat lebih banyak warga mampu berpartisipasi di dalamnya. ([World Bank](#))

Negara juga memiliki fungsi moral yang tidak dapat digantikan pasar, yakni menjamin bahwa manusia tidak jatuh di bawah ambang martabat tertentu. OHCHR menegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Prinsip ini menyiratkan bahwa negara tidak boleh membiarkan hasil pasar menempatkan warga dalam kondisi yang secara sistematis menghancurkan kehidupan layak. Perlindungan terhadap kemiskinan ekstrem, kelaparan, eksploitasi tenaga kerja, dan eksklusi kesehatan bukan semata urusan belas kasih, tetapi urusan penghormatan terhadap martabat manusia. ([OHCHR](#))

Dengan demikian, intervensi negara yang sah bukanlah intervensi yang semata-mata memperluas birokrasi atau membekukan inovasi. Intervensi yang sah adalah intervensi yang meratakan titik awal, mengoreksi kegagalan pasar, melindungi kelompok rentan dari guncangan, dan

membangun infrastruktur sosial-ekonomi yang membuat kebebasan pasar menjadi lebih substantif bagi lebih banyak orang. Intervensi seperti itu justru dapat dilihat sebagai pelengkap kebebasan ekonomi, bukan penyangkalannya. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

6. Krisis Keadilan dalam Arsitektur Ekonomi Dunia Kontemporer

Krisis keadilan dalam arsitektur ekonomi dunia kini terlihat dari beberapa gejala yang saling berkait. Pertama adalah stagnasi pengurangan kemiskinan dan kemakmuran bersama. World Bank menegaskan bahwa global poverty reduction has slowed to a near standstill, sehingga ada kekhawatiran bahwa 2020–2030 akan menjadi “lost decade.” Laporan yang sama menunjukkan bahwa jumlah orang yang hidup dengan kurang dari US\$6,85 per hari secara global hampir tidak berubah sejak 1990. Ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia tidak bergerak cukup inklusif untuk mengangkat kelompok bawah secara sistematis. ([World Bank](#))

Kedua adalah perlambatan pembangunan manusia. UNDP menyatakan bahwa kenaikan pembangunan manusia global yang diproyeksikan untuk 2024 adalah yang paling kecil sejak 1990 di luar tahun-tahun krisis. Laporan itu juga menekankan bahwa pilihan manusia, bukan AI itu sendiri, akan menentukan apakah teknologi memperluas kemungkinan hidup atau justru memperdalam polarisasi. Ini menunjukkan bahwa arsitektur ekonomi dunia tidak boleh hanya berfokus pada produksi teknologi dan kapital, tetapi juga pada distribusi kemampuan manusia untuk memanfaatkan kemajuan tersebut. ([Human Development Reports](#))

Ketiga adalah dunia kerja yang rapuh. ILO mencatat *jobs gap* sekitar 402,4 juta orang pada 2024 dan menyoroti adanya pemulihan ekonomi yang melemah, pengangguran pemuda yang persisten, serta disparitas gender yang terus membayangi pasar tenaga kerja. Bila jutaan orang tidak mendapat akses pada kerja yang layak, maka kebebasan pasar berubah menjadi semacam hak istimewa bagi mereka yang sudah memiliki keterampilan, jaringan, dan perlindungan. Dari sudut keadilan sosial,

pekerjaan bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi salah satu kanal utama pengakuan sosial dan martabat. ([International Labour Organization](#))

Keempat adalah jurang digital dan akses finansial yang belum tertutup. ITU melaporkan bahwa pada 2024 masih ada 189 juta lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang menggunakan internet, dengan 70 persen laki-laki dan 65 persen perempuan terkoneksi. Findex 2025 memang menunjukkan kemajuan besar dalam kepemilikan akun, tetapi juga mencatat adanya kesenjangan akses dan penggunaan layanan digital serta finansial bagi perempuan dan kelompok miskin. Di dunia yang makin terdigitalisasi, ketimpangan akses ini berarti ketimpangan peluang ekonomi, pendidikan, informasi, dan partisipasi sipil. ([ITU](#))

Kelima adalah ketimpangan yang makin multidimensi. *World Inequality Report 2026* menegaskan bahwa ketimpangan tetap ekstrem dan persisten, serta kini memanifestasikan diri di banyak bidang yang saling menguatkan: pendapatan, kekayaan, gender, akses terhadap modal manusia, iklim, dan asimetri sistem keuangan global. Laporan itu sekaligus menunjukkan bahwa ketimpangan bisa dikurangi melalui kebijakan seperti transfer redistributif, perpajakan progresif, investasi dalam modal manusia, dan penguatan hak buruh. Pesannya sangat jelas: arsitektur ekonomi dunia tidak netral terhadap ketimpangan; ia bisa didesain ulang. ([World Inequality Report 2026](#))

7. Menuju Sintesis Baru: Kebebasan Pasar, Intervensi Negara, dan Keadilan Sosial

Jika pasar murni tidak cukup, tetapi negara total juga bukan jawaban, maka apa bentuk sintesis yang mungkin? Langkah pertama adalah mengakui bahwa kebebasan pasar perlu dipertahankan sebagai sumber dinamika ekonomi. Tanpa ruang bagi inisiatif, inovasi, investasi, dan pertukaran, perekonomian akan kehilangan salah satu mesin utama penciptaan nilai. Akan tetapi, kebebasan pasar harus dipahami secara institusional, bukan metafisik. Ia selalu beroperasi di atas fondasi pendidikan, hukum, kesehatan, infrastruktur, dan stabilitas politik yang dibentuk secara kolektif.

Dengan demikian, mempertahankan pasar justru menuntut investasi besar dalam barang publik. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Langkah kedua adalah menempatkan negara sebagai *enabler* sekaligus korektor. Sebagai *enabler*, negara membangun syarat-syarat partisipasi: pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan anak, infrastruktur digital, dan akses transportasi. Sebagai korektor, negara memakai perpajakan, transfer, regulasi tenaga kerja, hukum persaingan, dan jaring pengaman untuk mencegah hasil pasar mengeras menjadi hierarki yang turun-temurun. World Bank dan World Inequality Report 2026 sama-sama memberi dukungan empiris bahwa investasi dalam modal manusia, perpajakan progresif, dan hak-hak buruh dapat mengurangi ketimpangan secara nyata. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Langkah ketiga adalah memperluas skala keadilan hingga tingkat global. Dalam ekonomi dunia yang terintegrasi, kebijakan domestik progresif dapat terbentur oleh arsitektur internasional yang tidak adil: perpajakan lintas negara yang bocor, utang yang menekan ruang fiskal, teknologi yang terkonsentrasi, dan pembiayaan pembangunan yang terbatas. IMF menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi pertumbuhan lebih lemah dan ketidakpastian lebih besar; dalam situasi seperti itu, negara berpendapatan rendah dan menengah paling mudah terjepit. Karena itu, keadilan sosial dalam arsitektur ekonomi dunia memerlukan pembaruan tata kelola internasional, bukan hanya reformasi domestik. ([IMF](#))

Langkah keempat adalah memperbarui ukuran keberhasilan ekonomi. OECD menunjukkan bahwa kesejahteraan harus diukur melalui berbagai dimensi, bukan hanya output ekonomi. World Bank mengembangkan *Global Prosperity Gap* justru karena rata-rata pertumbuhan tidak cukup menangkap jarak masyarakat dari kehidupan yang lebih makmur. Maka, sintesis baru antara pasar dan negara juga menuntut sintesis baru dalam metrik: bukan PDB melawan kesejahteraan, tetapi PDB ditempatkan sebagai salah satu indikator di antara ukuran yang lebih berpusat pada kehidupan manusia. ([OECD](#))

Pada akhirnya, sintesis yang dibutuhkan bukanlah kompromi lemah, melainkan pengaturan ulang hirarki. Pasar harus ditempatkan sebagai sarana penciptaan nilai, negara sebagai penjamin keadilan dasar dan korektor kegagalan pasar, dan institusi global sebagai arena untuk membagi manfaat globalisasi secara lebih adil. Jika hirarki ini dibalik—jika pasar menjadi tujuan tertinggi dan negara hanya dipandang sebagai pengganggu—maka arsitektur ekonomi dunia akan terus menghasilkan ketimpangan, ketidakamanan, dan polarisasi. Namun jika pasar, negara, dan institusi global diletakkan dalam relasi yang lebih seimbang, maka keadilan sosial dapat berhenti menjadi slogan dan mulai menjadi desain. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

8. Penutup

Keadilan sosial dalam arsitektur ekonomi dunia tidak dapat dicapai dengan menyanjung kebebasan pasar tanpa batas, tetapi juga tidak akan lahir dari romantisme intervensi negara yang melumpuhkan dinamika ekonomi. Perdebatan yang produktif bukanlah “pasar atau negara,” melainkan bagaimana kebebasan ekonomi dan intervensi publik dapat disusun agar saling melengkapi dalam melayani kehidupan manusia. Pasar penting karena ia mendorong produktivitas dan inovasi. Negara penting karena ia membentuk syarat-syarat partisipasi yang adil, melindungi warga dari guncangan, dan mengoreksi distribusi yang timpang. Institusi global penting karena dalam ekonomi dunia yang saling bergantung, keadilan tidak lagi berhenti di dalam perbatasan nasional. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Data mutakhir dari World Bank, UNDP, IMF, ILO, OECD, ITU, dan WHO menunjukkan bahwa tantangan utama dunia bukan sekadar pertumbuhan yang kurang, tetapi kemakmuran yang terlalu eksklusif, kesejahteraan yang tidak seimbang, kerja yang rapuh, dan perlindungan sosial yang belum memadai. Bila fakta-fakta ini dibaca secara serius, maka keadilan sosial harus dipahami bukan sebagai biaya tambahan dari sistem ekonomi, melainkan sebagai syarat dasar bagi stabilitas, legitimasi, dan keberlanjutan

sistem itu sendiri. Dunia yang lebih adil bukan dunia tanpa pasar, tetapi dunia di mana pasar tertanam dalam institusi yang menjaga martabat manusia dan membagi peluang secara lebih layak. ([World Bank](#))

Dengan demikian, masa depan arsitektur ekonomi dunia bergantung pada keberanian intelektual dan politik untuk menolak dua ilusi: ilusi bahwa pasar akan menyelesaikan semuanya, dan ilusi bahwa negara bisa menggantikan seluruh fungsi pasar. Yang dibutuhkan adalah desain institusional yang lebih cerdas dan lebih manusiawi. Di situlah kebebasan pasar menemukan batasnya yang sah, dan intervensi negara menemukan legitimasi moralnya. Di situlah pula keadilan sosial berhenti menjadi koreksi pinggiran dan mulai menjadi pusat dari ekonomi dunia yang layak dipertahankan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Glosarium

Arsitektur ekonomi dunia

Susunan institusi domestik dan internasional yang mengatur perdagangan, keuangan, produksi, distribusi, kerja, dan perlindungan sosial pada skala global. Konsep ini menyoroti bahwa ekonomi dunia dibentuk oleh aturan, bukan sekadar oleh kekuatan pasar spontan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Keadilan distributif

Prinsip-prinsip normatif yang membimbing bagaimana manfaat dan beban ekonomi semestinya dibagi dalam masyarakat melalui proses dan struktur politik. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Kebebasan pasar

Ruang bagi individu, perusahaan, dan agen ekonomi untuk bertukar, berinovasi, berinvestasi, dan merespons sinyal harga dengan campur

tangan yang relatif terbatas. Dalam praktiknya, kebebasan ini selalu berlangsung dalam kerangka hukum dan kelembagaan tertentu. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Intervensi negara

Tindakan pemerintah untuk membentuk, mengarahkan, atau mengoreksi hasil pasar melalui hukum, pajak, transfer, regulasi, layanan publik, dan kebijakan industri atau sosial. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Shared prosperity

Ukuran yang digunakan World Bank untuk menilai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan lebih rendah. ([World Bank](#))

Global Prosperity Gap

Indikator World Bank yang melacak seberapa jauh rata-rata pendapatan masyarakat dari ambang kemakmuran yang layak, dengan penekanan khusus pada kondisi kelompok termiskin. ([World Bank](#))

Jobs gap

Ukuran ILO tentang jumlah orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, termasuk penganggur, pekerja putus asa, dan mereka yang belum dapat memasuki pasar kerja secara efektif. ([International Labour Organization](#))

Perlindungan sosial

Serangkaian program dan institusi publik yang melindungi individu dan rumah tangga dari risiko seperti kemiskinan, sakit, pengangguran, usia lanjut, dan krisis ekonomi. ([World Bank](#))

Determinasi sosial kesehatan

Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, yang sangat memengaruhi hasil kesehatan dan ketidaksetaraan kesehatan. ([World Health Organization](#))

Inklusi digital

Keadaan ketika masyarakat memiliki akses yang adil pada internet, perangkat, keterampilan digital, dan keamanan penggunaan teknologi sehingga mampu berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan masyarakat modern. ([ITU](#))

Referensi (APA 7)

- Blake, M. (2013). *International distributive justice*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Brock, G. (2015). *Global justice*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Fleischacker, S. (2013). *Adam Smith's moral and political philosophy*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Fleurbaey, M. (2004). *Normative economics and economic justice*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Herzog, L. (2013). *Markets*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.
- International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, April 2025: A critical juncture amid policy shifts*. IMF.
- International Telecommunication Union. (2024). *Facts and figures 2024*. ITU.
- Lamont, J., & Favor, C. (2013). *Distributive justice*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *How's life? 2024: Measuring well-being*. OECD Publishing.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

World Bank. (2024). *Policies for inclusive growth: Strengthening the link between economic growth and equity*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Bank. (2024). *World development report 2024: The middle-income trap*. World Bank.

World Bank. (2025). *State of social protection report 2025: The 2-billion-person challenge*. World Bank.

World Bank. (2025). *The Global Findex database 2025*. World Bank.

World Health Organization. (2025). *Social determinants of health*. WHO.

World Inequality Lab. (2025). *World inequality report 2026: Executive summary*. WID.world.

World Trade Organization. (2024). *World trade report 2024: Trade and inclusiveness—How to make trade work for all*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 14 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69db94ae-3dec-8398-916d-3a7fb8f50b29>